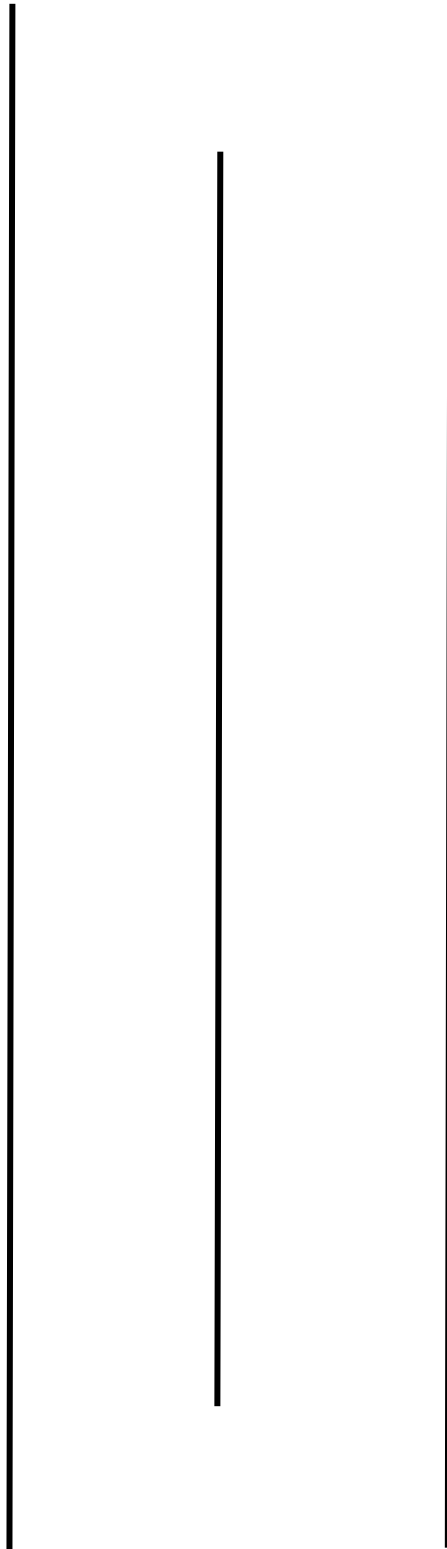


# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
TAHUN 2019**

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3. Sumber Daya Manusia
- 1.4. Identifikasi Masalah Internal dan Ekternal
- 1.5. Sistematika Penyusunan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KESBANGPOL KABUPATEN LEBONG 2019**

- 3.1 Capaian Kinerja 2019
- 3.2 Pengukuran Akuntabilitas Keuangan 2019
- 3.3 Pengukuran Akuntabilitas Keuangan 2019

### **BAB IV PENUTUP**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan Nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat Kabupaten Lebong. Dalam perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Kabupaten Lebong memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 ( tujuh ) azas – azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja sebanyak 7 (Tujuh) program yang terbagi menjadi 14 (Empat Belas) kegiatan sesuai dengan DPA – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2019. Maka kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2019, secara kuantitatif mencapai angka 93% atau secara kualitatif termasuk kategori baik. Namun demikian pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong untuk Tahun 2019 sebagaimana tersebut diatas didorong oleh :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup memadai dari sisi pendidikan yang terdiri Strata S2, S1, Diploma, SMA dan SMP.
2. Tersedianya perangkat hukum yang jelas terhadap peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong yang ditetapkan Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan, Nomor 12 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebong.

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai guna mendukung tugas-tugas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.
4. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh karyawan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga.

Sehubungan dengan itu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong sebagai unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon III diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategi, juga menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ( Renstra ) selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong melalui kompilasi dari seluruh kegiatan strategis dari unit kerja yang ada.

Sasaran penyusunan LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong ini adalah sebagai laporan kegiatan strategis dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong, yang diwujudkan oleh unit-unit kerja yang ada didalamnya, berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBK Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb.

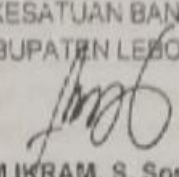
Puji Syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT, atas limpah dan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan Shalawat dan salam dipersembahkan kejunjungan Baginda Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan pengorbanan beliau dalam menegakan Syiar Islam.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2019 diselesaikan oleh Tim penyusun dengan data-data yang diperoleh dalam lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong, sesuai dengan Peraturan nomor 11 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebong. Penyusunan Lakip Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2019 di maksudkan sebagai perwujudan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan yang di cerminkan dari pencapaian kinerja sesuai visi, misi dan tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong. Lakip Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam APBK Kabupaten Lebong tahun 2019.

Dalam Laporan ini, Tim penyusun sadar akan kekurangan dalam penyajian isi, materi maupun data yang termuat di dalamnya, oleh karenanya masukan maupun saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini dikemudian hari. Dan tidak lupa tim penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang terlibat dan ikut serta dalam segala hal sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat ini dapat diselesaikan.

Akhir kata mudah-mudahan laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan kelengkapan yang dibutuhkan di Pemerintahan Kabupaten Lebong.

Wassalam.

Tubei, April 2019  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LEBONG  
  
**M. IKRAM, S. Sos**  
Pembina TK. | Nip. 19770520 2008 100 8



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Mendorong Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- b. Menjadikan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong memiliki akuntabilitas sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lebong terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

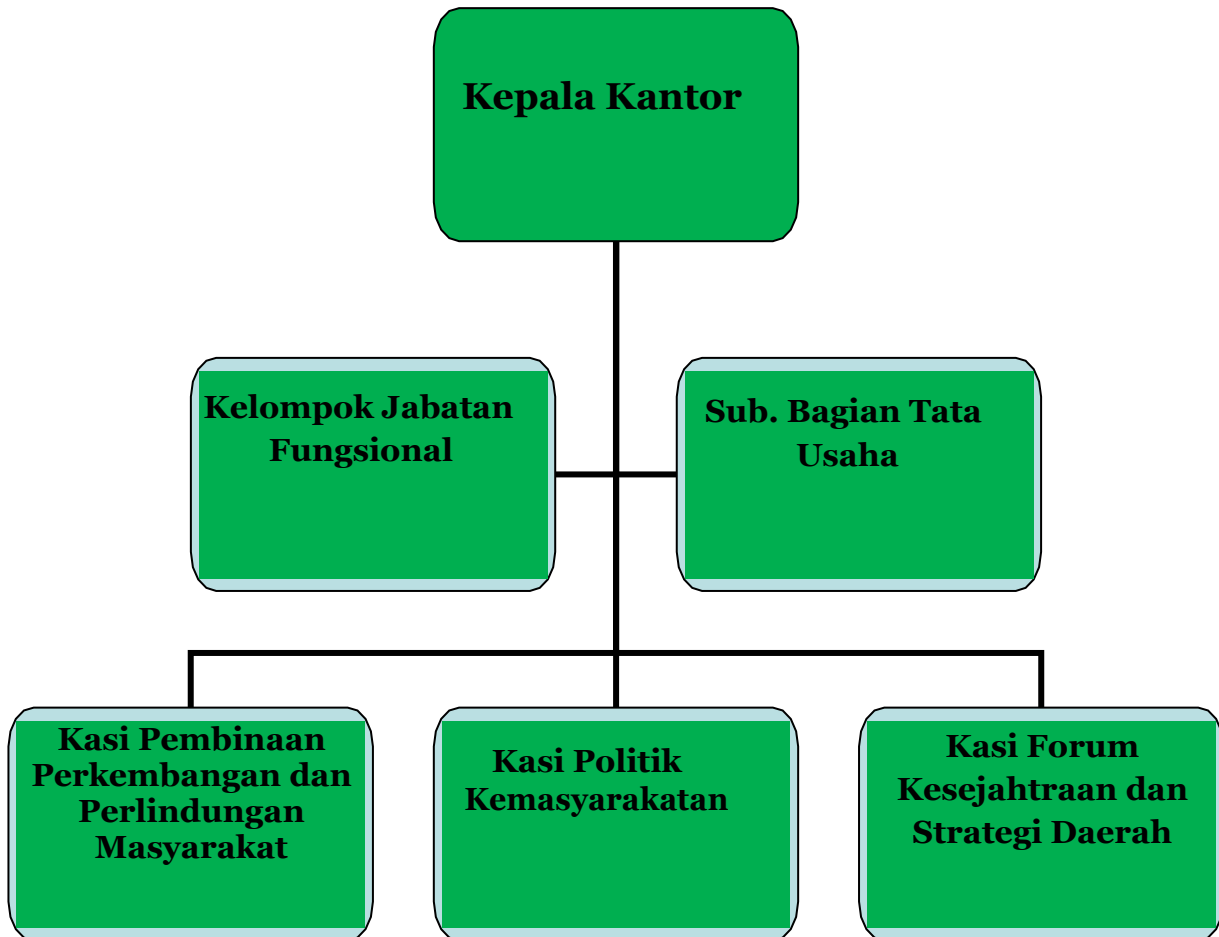
Dasar hukum pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong adalah Peraturan Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebong.

Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Lebong melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbag Tata Usaha;
- c. Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan;
- d. Seksi Politik Kemasyarakatan;
- e. Seksi Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan.

Berikut di bawah ini ditampilkan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong dalam Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong**





Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;
7. Pelaksanaan administrasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong ; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Lebong.

Adapun kewenangan yang diberikan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong, antara lain adalah:

- a. Memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
- c. Melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
- d. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. Memberikan izin penelitian;
- f. Melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada Ormas, LSM, Yayasan dan Forum; dan
- g. Melaksanakan Pengawasan Orang Asing.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi serta mengkoordinir kegiatan pada seksi-seksi. Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha keuangan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pada seksi-seksi.

Kepala Seksi Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pembinaan wawasan kebangsaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan. Seksi Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Penguatan Ideologi dan Kebangsaan;
- b. Meningkatkan kemampuan/kapasitas aparatur bidang bina ketahanan bangsa, Bela Negara dan Hak Azasi Manusia;
- c. Menyusun perencanaan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang Pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
- e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, mukim, gampong dan masyarakat di bidang ideologi negara, pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa, bela negara, nilai-nilai sejarah, akulturasi budaya, penanganan masalah sosial masyarakat dan penghargaan kebangsaan;
- f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, mukim, gampong dan masyarakat di bidang ideologi negara, pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa, bela negara, nilai-nilai sejarah, akulturasi budaya, penanganan masalah sosial masyarakat dan penghargaan kebangsaan;
- g. Meningkatkan kemampuan/kapasitas aparatur bidang pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.

Kepala Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan. Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Membina penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, mukim, gampong dan masyarakat (meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi pendidikan politik dan demokrasi;
- b. Mengawasi penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, mukim, gampong dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi pendidikan politik dan demokrasi;
- c. Meningkatkan kemampuan/kapasitas aparatur pemerintah di bidang penguatan politik dan demokrasi dalam negeri;
- d. Koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik dan lembaga infrastruktur politik;
- e. Melaksanakan kegiatan bidang sistem dan implementasi politik dan implementasi kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik dan lembaga infrastruktur politik;
- f. Memfasilitasi dan pengelolaan dinamika politik pemerintah dan pemerintah daerah, dinamika politik kemasyarakatan;

- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, mukim, gampong dan masyarakat (meliputi, koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik dan implementasi kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik dan lembaga infrastruktur politik;
- h. Mendorong tumbuhnya kesetiaan dan jiwa bela negara di kalangan generasi muda dalam sistem hankamnas;
- i. Menyelenggarakan forum komunikasi partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
- j. Melaksanakan kajian strategis dan fasilitasi kerjasama keamanan, intelegen penelitian;
- k. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan orang asing;
- l. Melaksanakan kajian strategis dan fasilitasi penyelesaian konflik suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);
- m. Mengawasi pelaksanaan kegiatan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.

Kepala Seksi Politik Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi Pendidikan Politik serta Pengkaderan dan Interaksi Antar Partai Politik. Seksi Politik Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Menyusun perencanaan teknis penyelenggaraan pembinaan pendidikan politik masyarakat dan demokrasi;
- b. Menyusun perencanaan teknis penyelenggaraan pembinaan kelembagaan politik, meliputi supra dan infrastruktur politik;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasional sistem dan implementasi pendidikan politik;
- d. Melaksanakan kegiatan bidang sistem dan implementasi pendidikan politik dan demokrasi;
- e. Mengembangkan dan mengupayakan penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
- f. Melaksanakan pendataan partai politik dan kelembagaan infrastruktur partai politik;
- g. Melaksanakan pendataan organisasi masyarakat (ormas);
- h. Menyelenggarakan rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), Lembaga Non-Pemerintah (NGO) baik lokal maupun asing;
- i. Melaksanakan langkah-langkah pencegahan terhadap upaya-upaya pendangkalan aqidah dan aktifitas keagamaan yang meresahkan masyarakat;
- j. Melakukan peningkatan kesadaran hukum dan hak azasi manusia;
- k. Melakukan upaya pemulihan wilayah pasca konflik dan daerah yang terkena bencana;
- l. Memfasilitasi dan mendukung kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum di daerah dan pemilihan kepala daerah;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang politik kemasyarakatan.

### 1.3. Sumber Daya Manusia

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong terdiri dari Jabatan 1 Kepala Kantor (pejabat eselon III.a), 1 Kasubbag Tata Usaha (eselon IV.a), 3 kepala Seksi (eselon IV.a). Jumlah pegawai sebanyak 18 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 7 orang dan pegawai honor sebanyak 11 orang. Berdasarkan jenis kelamin, pegawai laki-laki terdiri atas 12 orang dan 6 orang pegawai perempuan. Data jumlah PNS berdasarkan tingkat golongan dan tingkat pendidikan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong dapat dilihat pada tabel berikut.

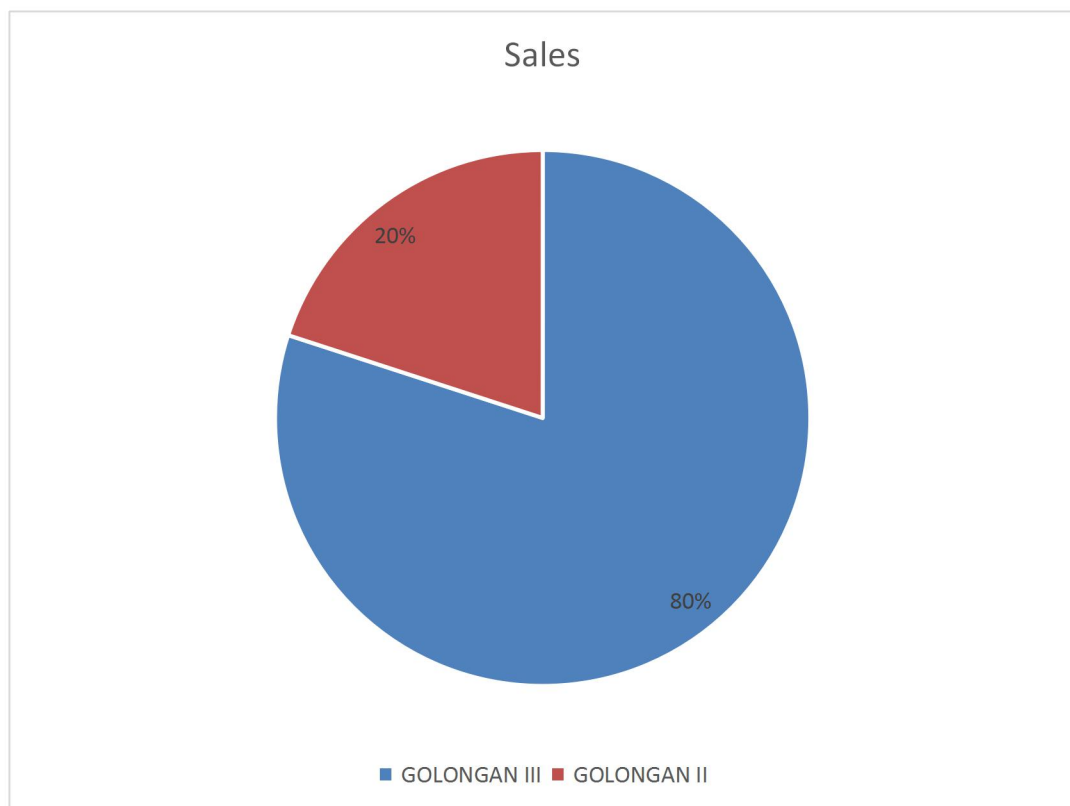
**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.**  
**Aceh Barat Berdasarkan Tingkat Golongan**

No	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan IV	-	-
2.	Golongan III	5	80 %
3.	Golongan II	2	20 %
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel di atas, PNS Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong didominasi oleh tingkatan Golongan III sebanyak 80 persen sementara selanjutnya Golongan II sebanyak 20 persen seperti yang ditampilkan dalam diagram berikut ini :

**Gambar 2.2**

**Proporsi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten lebong Berdasarkan Tingkat Golongan**



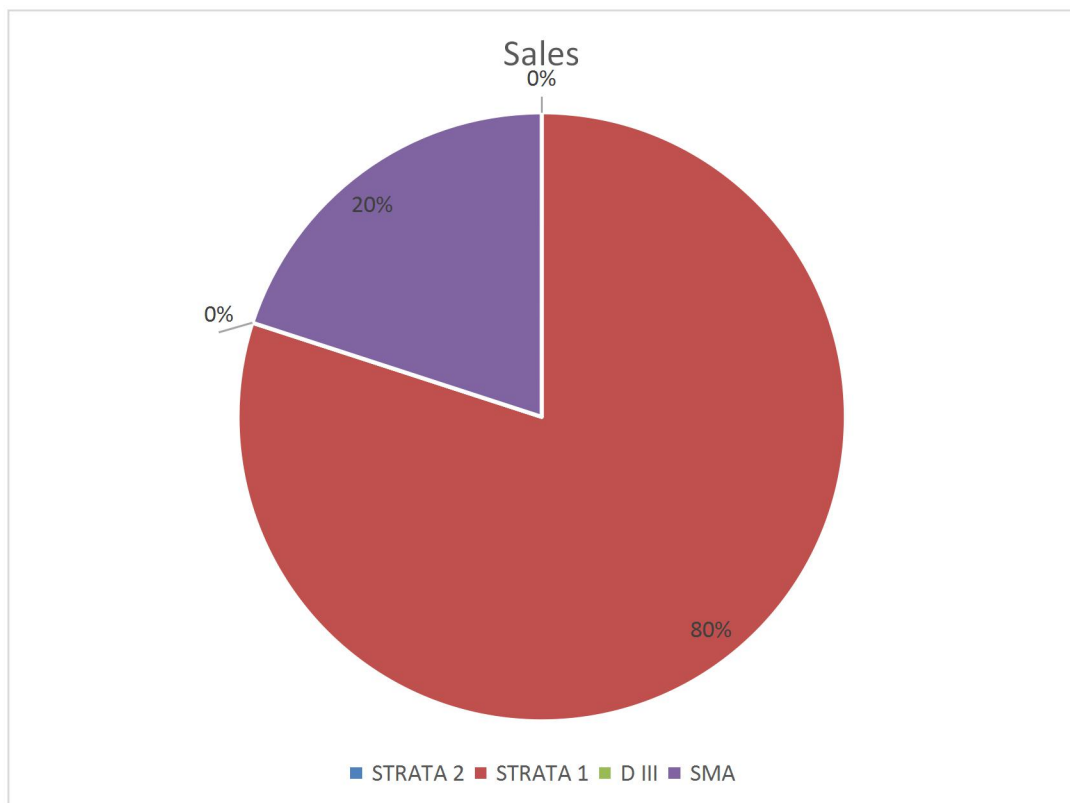
**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Lebong Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Strata 2	-	%
2	Strata 1	12	%
3	Diploma 3	-	%
4	SLTA	6	%
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	

Mengacu pada tabel di atas, PNS Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong didominasi oleh tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 80 persen, SLTA sebanyak 20 persen Strata 2 sebanyak 0 persen dan Diploma III sebanyak 0 persen.

**Gambar 1.3**

**Proporsi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik**  
**Kabupaten Lebong Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



#### 1.4. Identifikasi Permasalahan Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong

##### 1. Permasalahan Internal

Kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong bila dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) masih

ditemukan beberapa permasalahan kinerja pelayanan yang belum mencapai target. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain adalah:

- a. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong sehingga menyebabkan rendahnya kinerja dan pelayanan;
- b. Kurangnya jumlah pegawai yang cakap untuk menyelesaikan tugas dan kegiatan;
- c. Belum lengkapnya database Ormas, LSM, Yayasan dan rumah ibadah;
- d. Belum mantapnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Instansi terkait;
- e. Belum optimalnya kapasitas anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lebong;
- f. Belum mantapnya pelaksanaan pemantauan di lapangan untuk cegah dini gangguan keamanan, monitoring dan evaluasi atas keberadaan Ormas, LSM, Yayasan dan Rumah Ibadah.

## **2. Permasalahan Eksternal**

- a. Eufhoria Reformasi yang diasumsikan sebagai era kebebasan dimana publik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan pembenahan-pembenahan di tubuh pemerintahan. Namun semangat reformis yang muncul belum menemui cita-cita reformasi yang hakiki sehingga menimbulkan anomaly reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial yang justeru mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kemajemukan/keragaman dalam beragama di Kabupaten Lebong dipandang memiliki keragaman yang cukup signifikan, baik dilihat dalam keragaman dalam beragama dan suku bangsa, ini menjadikan sebuah tantangan yang besar dalam proses perbedaan dalam berkeyakinan. Tentunya hal ini memerlukan penanganan yang serius demi terciptanya keamanan di Kabupaten Lebong, agar tidak terjadi konflik-konflik yang bernuansa SARA yang sulit untuk dituntaskan seperti yang terjadi di daerah lain;
- c. Adanya Pengaruh Globalisasi yang dapat berpengaruh pada budaya dan gaya hidup masyarakat, yang bila tidak disertai dengan benteng pertahanan diri yang kokoh dapat merubah perilaku dan budaya luhur masyarakat khususnya dikalangan generasi muda di Kabupaten Lebong

Peningkatan kualitas penyelenggaraan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong meliputi kapasitas sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku meliputi :

1. Tersedianya data, penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Terlaksananya pembinaan, pengawasan, evaluasi dan laporan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lebong saat ini menjadi urusan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini

mengingat Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan aspek yang menentukan jalannya pembangunan di Kabupaten Lebong dapat berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi Urusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lebong dapat dilihat dari kinerja aspek-aspek Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

**BAB I Pendahuluan** memuat Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Identifikasi Masalah, Sistematika Penyusunan.

**BAB II Perencanaan Kinerja** memuat ringkasan/ ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun 2019

**BAB III Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2018** memuat Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lebong tahun 2019 dan Realisasi Anggaran.

**BAB IV Penutup** memuat Kesimpulan atas pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lebong, langkah kedepan guna peningkatan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Visi Pemerintah Kabupaten Lebong ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Lebong dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong untuk Tahapan Pembangunan ke-2 tahun 2012-2017 yakni untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Lebong di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Dalam visi Kabupaten Lebong Tahun 2012-2017 terdapat tiga kata kunci yakni ***makmur, sehat dan berwawasan***. Kata ***makmur*** mengandung makna bahwa terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Lebong secara kuantitas dan kualitas dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya melalui pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kata ***sehat*** mengandung makna bahwa terciptanya harmonisasi antara masyarakat dengan lingkungannya dalam rangka menjamin tercapainya derajat hidup yang berkualitas baik secara fisik maupun mental; dan kata ***berwawasan*** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Lebong mendapatkan akses pendidikan yang luas baik formal maupun non formal yang ditunjang dengan teknologi informasi yang berlandaskan syariat Islam dan budaya Kabupaten Lebong . Untuk dapat melihat pokok-pokok visi yang diterjemahkan dalam pengertiannya sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.1  
Rencana Kinerja 2018**

No	Sasaran	Indikator	Target 2019
1	Meningkatnya dan terpeliharanya stabilitas keamanan, lingkungan kehidupan yang tentram, tertib dan nyaman	Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan (kegiatan)	2 Keg
2	Meningkatnya dan terpeliharanya stabilitas keamanan, lingkungan kehidupan yang tentram, tertib dan nyaman	Prosentase penanganan gangguan keamanan yang terkendali	2 Keg
3	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan idiologi negara	Jumlah penanganan insiden yang disebabkan masalah SARA	3 Keg

No	Sasaran	Indikator	Target 2019
4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi penanggulangan penyakit masyarakat	Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan (kegiatan)	3 Keg
5	Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azazi manusia	Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	1 Keg
6	Meningkatnya akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 Keg
7	Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azazi manusia	Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	1 Keg
8	Meningkatnya akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan lembaga penyelenggara pemilu	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu	1 Keg
9	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan ideologi negara	Peningkatan pemahaman wawasan dan ideologi kebangsaan (kegiatan)	1 Keg
10	Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azazi manusia	Jumlah penanganan pengaduan HAM	1 Keg
11	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan ideologi negara	Jumlah penanganan insiden yang disebabkan masalah SARA	2 Keg
12	Meningkatnya dan terpeliharanya stabilitas keamanan, lingkungan kehidupan yang tentram, tertib dan nyaman	Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan (kegiatan)	2 Keg
13	Meningkatnya mediasi dan fasilitasi hubungan pelaksanaan pengembangan demokrasi	Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	1 Keg

Adapun rencana anggaran meliputi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang tertera di Rencana Strategis Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong tahun 2019 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Rencana Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif 2018**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Pencapaian	
			Target	(Rp)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Tengah Masyarakat</b>	<b>1 Keg</b>	158.000.000,00
1	Penyusunan Renja, LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan evaluasi kegiatan	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1 Keg	25.000.000,00
<b>II</b>	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>2 Keg</b>	79.851.288,00
1	Peningkatan kerjasama dengan aparat kermanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Meningkatnya aparat kermanan dalam teknik pencegahan kejahatan	4 Keg	39.977.938,00
2	Penanganan gangguan konflik sosial	Tertanganinya konflik sosial	4 Keg	39.873.350,00
<b>III</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>1</b>	24.280.500,00
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	3	24.280.500,00
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>Terlaksananya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>1 keg</b>	30.541.910,00
1	Sosialisasi Peningkatan Keamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan lingkungan	1 keg	30.541.910,00
<b>V</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Terbinanya Pendidikan Politik di Daerah</b>	<b>2 Keg</b>	<b>40.212.710,00</b>
1	Verifikasi Partai Politik	Terciptanya Tertib Administrasi Bagi Partai-Partai Politik	1 Keg	15.478.700,00
2	Pembinaan/Pelatihan Keorganisasian Masyarakat	Meningkatnya Pengetahuan Keorganisasian Bagi	1 Keg	24.734.010,00

		Masyarakat Luas		
<b>VI</b>	<b>Program Pelaksanaan Pemilu</b>	<b>Terlaksananya Pemilu</b>	<b>1 Keg</b>	<b>185.129.250,00</b>
1	Desk Pemilihan Kepala Daerah	Terpantaunya Pemilu	1 Keg	185.129.250,00
<b>VII</b>	<b>Program Pembinaan Ideologi Kabangsaan</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Ideologi Kabangsaan</b>	<b>3 Keg</b>	<b>68.682.380,00</b>
1	Sosialisasi Terhadap Nilai-Nilai Falsafah Negara Pancasila an UUD 1945	Terbinanya Ideologi Masyarakat Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	1 Keg	30.217.350,00
2	Sosialisasi Hak Azasi Manusia	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Hak Azasi Manusia	1 Keg	23.841.260,00
3	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terbinanya kerukunan antar etnis dan suku bangsa di Aceh Barat	2 Keg	14.623.770,00
<b>VIII</b>	<b>Program Pencegahan Dini Masyarakat</b>	<b>Tercegahnya Ancaman Dini Terhadap Masyarakat</b>	<b>1 Keg</b>	<b>56.876.215,00</b>
1	Pencegahan dan Penanggulangan Dini Terhadap Ancaman Dalam Masyarakat	Terwujudnya secara dini kewaspadaan masyarakat terhadap Berbagai ancaman	2 Keg	56.876.215,00

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019

##### 3.1. Capaian Kinerja Kantor Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2019

Analisis kinerja meliputi uraian keterkaitan kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan evaluasi kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Hasil dari pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator, yaitu : masukan (*input*), keluaran (*ouput*), hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*). Penilaian tersebut terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi penggambaran pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100$$

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong termasuk Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun Indikator pengukuran kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kantor Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lebong tahun**  
**2019**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Pencapaian rencana Tingkat Capaian	status
1	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi penanggulangan penyakit masyarakat	Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan (kegiatan)	Keg	4	3	75%	Tidak sesuai Target
		Prosentase penanganan gangguan keamanan yang terkendali	Keg	4	3	75%	Tidak sesuai Target
2	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan ideologi negara	Jumlah penanganan insiden yang disebabkan masalah SARA	Keg	3	2	75%	Tidak sesuai Target
3	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi penanggulangan penyakit masyarakat	Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan (kegiatan)	Keg	1	1	100%	sesuai Target
4	Meningkatnya akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat	Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	Keg	1	1	100%	sesuai Target
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Keg	1	1	100%	sesuai Target
		Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	Keg	1	0	0%	Tidak sesuai Target
5	Meningkatnya akurasi dan validasi data, mediasi dan	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu	Keg	1	1	100%	sesuai Target

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Pencapaian rencana Tingkat Capaian	status
	fasilitasi hubungan lembaga penyelenggara pemilu						
5	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan ideologi negara	Peningkatan pemahaman wawasan dan ideologi kebangsaan (kegiatan)	Keg	1	1	100%	sesuai Target
		Jumlah penanganan pengaduan HAM	Keg	1	1	100%	sesuai Target
		Jumlah penanganan insiden yang disebabkan masalah SARA	Keg	2	1	50%	Tidak sesuai Target
6	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi penanggulangan penyakit masyarakat	Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan (kegiatan)	Keg	2	2	100%	sesuai Target
7	Meningkatnya Pendidikan politik, Kehidupan Demokrasi dan pemahaman Hak azazi Manusia	Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	Keg	1	0	0%	Tidak sesuai Target

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa terdapat 5 (lima) sasaran meliputi 8 (delapan) indikator kinerja sebagai acuan pengukuran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong, dilihat dari pencapaian yang direncanakan semua indikator kinerja sesuai target.

Berikut merupakan perbandingan capaian dan realisasi target kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong tahun sebelumnya.



**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dan tahun sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Perbandingan Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja		Perbandingan Capaian Kinerja
				2018	2019	2018	2019		2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	(8)=7/8*100	(9)=7/5*100	(10)=8/6*100	(11)=9/10*100
1	Meningkatnya dan terpeliharanya stabilitas keamanan, lingkungan kehidupan yang tenang, tertib dan nyaman	Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan	Keg	3	4	3	3	100	100	75	133
		Prosentase penanganan gangguan keamanan yang terkendali	Keg	3	4	3	3	100	100	75	133
2	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan ideologi negara	Jumlah penanganan insiden yang disebabkan masalah SARA	Keg	3	3	3	2	150	100	66	151
3	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi	Pemberantasan penyakit masyarakat	Keg	1	1	1	1	100	100	100	100

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Perbandingan Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja		Perbandingan Capaian Kinerja
				2018	2019	2018	2019		2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	(8)=7/8*100	(9)=7/5*100	(10)=8/6*100	(11)=9/10*100
	penanggulangan penyakit masyarakat	serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan									
4	Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azazi manusia	Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	Keg	1	1	1	1	100	100	100	100
		Jumlah LSM Aktif	Keg	1	1	1	1	100	100	100	100
		Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	Keg	1	1	1	0	0	100	0	0
		Pesta Demokrasi (Pemilu) (Kegiatan)	Keg	0	1	0	1	0	0	100	0
5	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan idiologi negara	Peningkatan pemahaman wawasan dan ideologi kebangsaan	Keg	1	1	1	1	100	100	100	100
		Jumlah penanganan pengaduan HAM	Keg	1	1	1	1	100	100	100	100
		Jumlah penanganan insiden yang	Keg	2	2	2	1	200	100	50	200

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Perbandingan Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja		Perbandingan Capaian Kinerja
				2018	2019	2018	2019		2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	(8)=7/8*100	(9)=7/5*100	(10)=8/6*100	(11)=9/10*100
		disebabkan masalah SARA									
6	Meningkatnya dan terpeliharanya stabilitas keamanan, lingkungan kehidupan yang tentram, tertib dan nyaman	Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan	Keg	2	2	2	2	100	100	100	100
7	Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azazi manusia	Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	Keg	1	1	1	0	100	100	0	0

Dari Tabel. 3.2 menampilkan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2017 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, berkenaan dengan tabel tersebut dapat kita lihat perbandingan realisasi kinerja yaitu pada :

1. Sasaran Meningkatnya dan terpeliharanya stabilitas keamanan, lingkungan kehidupan yang tentram, tertib dan nyaman dengan indikator Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan didapati hasil perbandingan realisasi kinerja sebesar 100% dan perbandingan capaian kinerja sebesar 133%.
2. Sasaran Meningkatnya dan terpeliharanya stabilitas keamanan, lingkungan kehidupan yang tentram, tertib dan nyaman dengan indikator Prosentase penanganan gangguan keamanan yang terkendali didapati hasil perbandingan realisasi kinerja sebesar 100% dan perbandingan capaian kinerja sebesar 133%.
3. Sasaran Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan ideologi negara dengan indikator Jumlah penanganan insiden yang disebabkan masalah SARA didapati hasil perbandingan realisasi kinerja sebesar 150% dan perbandingan capaian kinerja sebesar 151%.
4. Sasaran Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi penanggulangan penyakit masyarakat dengan indikator Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan didapati hasil perbandingan realisasi kinerja sebesar 100% dan perbandingan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Sasaran Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azazi manusia dengan indikator Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat didapati hasil perbandingan realisasi kinerja sebesar 100% dan perbandingan capaian kinerja sebesar 100%.
6. Sasaran Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azazi manusia dengan indikator Jumlah LSM Aktif didapati hasil perbandingan realisasi kinerja sebesar 100% dan perbandingan capaian kinerja sebesar 100%.
7. Sasaran Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azazi manusia dengan indikator Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat didapati hasil perbandingan realisasi kinerja sebesar 0% dan perbandingan capaian kinerja sebesar 0%.
8. Sasaran meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan ideologi negara dengan indikator Peningkatan pemahaman wawasan dan ideologi kebangsaan didapati hasil perbandingan realisasi kinerja sebesar 100% dan perbandingan capaian kinerja sebesar 100%.
9. Sasaran meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan ideologi negara dengan indikator Jumlah penanganan pengaduan HAM didapati hasil perbandingan realisasi kinerja sebesar 100% dan perbandingan capaian kinerja sebesar 100%.

10. Sasaran Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan ideologi negara dengan indikator Jumlah penanganan insiden yang disebabkan masalah SARA didapati hasil perbandingan realisasi kinerja sebesar 200% dan perbandingan capaian kinerja sebesar 200%.
11. Sasaran Meningkatnya dan terpeliharanya stabilitas keamanan, lingkungan kehidupan yang tentram, tertib dan nyaman dengan indikator Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan didapati hasil perbandingan realisasi kinerja sebesar 100% dan perbandingan capaian kinerja sebesar 100%
12. Sasaran Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azasi manusia dengan indikator Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat didapati hasil perbandingan realisasi kinerja sebesar 100% dan perbandingan capaian kinerja sebesar 0%

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Dan Tahun 2017 Dengan Target renstra**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Realisasi Kinerja s.d tahun ini	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja s.d Tahun ini	Target Renstra	Target Renstra yang belum Tercapai
				2018	2019	2018	2019		2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=7+8	10	11	(12)=10+1 1	13	(14)=13-12
1	Meningkatnya dan terpeliharanya stabilitas keamanan, lingkungan kehidupan yang tentram, tertib dan nyaman	Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan	Keg	3	4	3	3	6	100	75	175	16	0
2	Meningkatnya dan terpeliharanya stabilitas keamanan, lingkungan kehidupan yang tentram, tertib dan nyaman	Prosentase penanganan gangguan keamanan yang terkendali	Keg	3	4	3	3	6	100	75	175	16	0
3	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan idiologi negara	Jumlah penanganan insiden yang disebabkan masalah SARA	Keg	4	3	4	2	6	100	66	166	8	0
4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi penanggulangan penyakit masyarakat	Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan	Keg	1	1	1	1	2	100	100	200	5	0

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Realisasi Kinerja s.d tahun ini (9)=7+8	2018		2019	Target Renstra	Target Renstra yang belum Tercapai
				2018	2019	2018	2019		2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=7+8	10	11	(12)=10+1 1	13	(14)=13-12
		(kegiatan)											
5	Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azazi manusia	Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	Keg	1	1	1	1	2	100	100	200	5	0
6	Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azazi manusia	Jumlah LSM Aktif	Keg	1	1	1	1	2	100	100	200	5	0
7	Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azazi manusia	Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	Keg	1	1	1	1	1	100	100	100	5	0
8	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan ideologi negara	Peningkatan pemahaman wawasan dan ideologi kebangsaan (kegiatan)	Keg	1	1	1	1	2	100	100	200	4	0
9	Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi	Jumlah penanganan pengaduan HAM	Keg	1	1	1	1	2	100	100	200	5	0

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Realisasi Kinerja s.d tahun ini	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja s.d Tahun ini	Target Renstra	Target Renstra yang belum Tercapai
				2018	2019	2018	2019		2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=7+8	10	11	(12)=10+1 <sub>1</sub>	13	(14)=13-12
	dan pemahaman hak azazi manusia												
13	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan idiologi negara	Jumlah penanganan insiden yang disebabkan masalah SARA	Keg	2	2	2	1	3	100	50	150	4	0
14	Sasaran Meningkatnya dan terpeliharanya stabilitas keamanan, lingkungan kehidupan yang tentram, tertib dan nyaman	Pemberantasan penyakit masyarakat serta pemeliharaan dan peningkatan keamanan lingkungan	Keg	2	2	2	2	4	100	100	200	10	2
15	Sasaran Meningkatnya pendidikan politik, kehidupan demokrasi dan pemahaman hak azazi manusia	Jumlah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	Keg	1	1	1	0	1	100	0	100	5	1



### 3.2. Pengukuran Akuntabilitas Keuangan 2018

Untuk Tahun 2018 Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong memiliki belanja sebesar Rp.1.642.297.272,00 yang terdiri dari Belanja tidak langsung Rp. 597.406.204,00 dan Belanja langsung Rp. 1.642.297.272,00 dengan rasio 35,86 Belanja tidak langsung dan 64,14 Belanja Langsung sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung 2018

NO	BELANJA	Rp	%
1	Belanja tidak langsung	547.406.204,00	64,14
2	Belanja langsung	1.642.297.272,00	35,86
	Jumlah	2.192.318.788,00	100,00

Untuk Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 11 program 27 kegiatan dengan total dana Belanja Langsung sebesar Rp. 786.270.540,00 dan kemudian dalam Renja Perubahan Belanja Langsung adalah Rp. 786.270.540,00, sementara itu dalam Rencana Strategis 2012-2017 khususnya untuk tahun 2017 sebesar Rp. 892.489.381,00

Perbandingannya dapat dilihat ditabel berikut ini :

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Program, Kegiatan dan Rencana Kerja Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong 2017 antara Rencana Strategis dengan Renja 2017 dan Renja Perubahan 2017

	Uraian Belanja Langsung	Dana
1	Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lebong 2018	892.489.381,00
2	Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lebong 2018 sebelum perubahan 2018	786.270.540,00
3	Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lebong 2018 Perubahan 2018	786.270.540,00

Pada tahun 2017 belanja Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.192.318.788,00 dengan realisasi Rp.2.140.678.248,00 atau 97,48%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.406.248,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.374.537.310,00 atau 97,76%, sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.786.270.540,00 dengan realisasi Rp.766.140.938,00 atau 97,44%.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi 2018 dan 2019**

NO	BELANJA	2016		2017		Realisasi Total 2016	Realisasi Total 2017
1	Belanja tidak langsung	1.675.243.561,00	61,40	1.406.048.248,00	64,14	93,38%	97,76%
2	Belanja langsung	1.052.988.200,00	38,60	786.270.540,00	35,86	97,61%	97,44%.
	Jumlah	2.728.231.761,00	100,00	2.728.231.761,00	100,00	96,28%	97,48% %

Dari Tabel diatas terlihat peningkatan dan penurunan jumlah maupun realisasi terutama Belanja Langsung dari kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Keuangan 2017**

Uraian Sesuai Dengan APBK	Pagu Anggaran	Tambah / (Kurang)	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>178.923.635,00</b>	<b>(56.367.800,00)</b>	<b>122.555.835,00</b>	<b>112.672.011,00</b>	<b>91,94</b>
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	56.417.877,00	(16.439.939,00)	39.977.000,00	35.543.005,00	88,91
Penanganan Gangguan Konflik Sosial	61.728.800,00	(21.855.450,00)	39.873.350,00	37.646.100,00	94,41
<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>37.906.150,00</b>	<b>(13.625.650,00)</b>	<b>24.280.500,00</b>	<b>24.270.900,00</b>	<b>99,96</b>
Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	37.906.150,00	(13.625.650,00)	24.280.500,00	24.270.900,00	99,96
<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>40.212.710,00</b>	<b>-</b>	<b>30.541.910,00</b>	<b>29.991.910,00</b>	<b>98,20</b>
Sosialisasi Peningkatan Keamanan Lingkungan	30.541.910,00	-	30.541.910,00	29.991.910,00	98,20
<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>81.178.729,00</b>	<b>(40.966.010,00)</b>	<b>40.212.710,00</b>	<b>40.212.710,00</b>	<b>100,00</b>
Verifikasi Partai Politik	17.127.700,00	(1.649.000,00)	15.478.700,00	15.478.700,00	100,00
Pembinaan/Pelatihan Keorganisasi Kemasyarakatan	32.943.010,00	(8.209.000,00)	24.734.010,00	24.734.010,00	100,00
Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	31.108.010,00	(31.108.010,00)	0,00	0,00	0,00
<b>Program Pelaksanaan Pemilu</b>	<b>185.129.250,00</b>	<b>6.220.000,00</b>	<b>185.129.250,00</b>	<b>178.909.250,00</b>	<b>96,64</b>
Desk Pemilihan Kepala Daerah	185.129.250,00	6.220.000,00	185.129.250,00	178.909.250,00	96,64

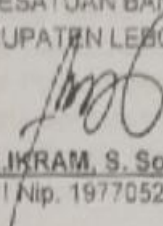
<b>Program Pembinaan Ideologi Kebangsaan</b>	<b>89.619.650,00</b>	<b>(20.937.270,00)</b>	<b>68.682.380,00</b>	<b>68.497.130,00</b>	<b>99,73</b>
Sosialisasi Terhadap Nilai-Nilai Falsafah Pancasila Dan Uud 1945	30.217.350,00	-	30.217.350,00	30.142.350,00	99,75
Sosialisasi Hak Azasi Manusia	30.222.760,00	(6.381.500,00)	23.841.260,00	23.766.260,00	99,69
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	29.179.540,00	(14.555.770,00)	14.623.770,00	14.588.520,00	99,76
<b>Program Pencegahan Dini Masyarakat</b>	<b>69.130.215,00</b>	<b>(12.254.000,00)</b>	<b>56.876.215,00</b>	<b>54.026.215,00</b>	<b>94,99</b>
Pencegahan Dan Penanggulangan Dini Terhadap Ancaman Dalam Masyarakat	69.130.215,00	(12.254.000,00)	56.876.215,00	54.026.215,00	94,99
<b>Program Kebijakan Politik Pemerintah</b>	<b>30.349.010,00</b>	<b>(30.349.010,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pencegahan Dan Penanggulangan Dini Terhadap Ancaman Dalam Masyarakat	30.349.010,00	(30.349.010,00)	0,00	0,00	0,00

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lebong (LAKIP) disusun berdasarkan Rencana Strategi dan Indikator Kinerja Utama dan Renja 2018 yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Kantor Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lebong , serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran.

Tubei, April 2019  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LEBONG  
  
MIKRAM, S. Sos  
Pembina TK. I Nip. 19770520 2006 100 8